



Bawaslu Atensi Khusus Pilkada yang Diikuti Keluarga Istana

Soroti Penggunaan APBD dan Netralitas ASN

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2020. Ada sembilan provinsi yang akan menggelar Pilkada pada tahun 2020. Pilkada untuk sembilan provinsi itu akan dilakukan



serentak dengan Pilkada tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan untuk tingkat kabupaten ada 224 wilayah kabupaten, dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 provinsi. Demi mensosialisasikan Pilkada 2020, Bawaslu RI me-

nyambangi 'markas besar' *Tribun Network* di Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Rabu (11/3). Mereka di antaranya adalah Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar bersama dengan Tim dari Humas Bawaslu. Kedatangan Tim Bawaslu di-

■ Bersambung ke hal. 7



Soroti Penggunaan APBD dan Netralitas

Sambungan Hal.1

terima oleh Regional Newspaper Director Febby Mahendra Putra beserta Staf Direksi Ceper Burdansyah, dan awak *Tribun Network* lainnya. Pada pertemuan di siang hari itu, Bawaslu memaparkan daerah mana saja yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Diukur melalui empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. Terdapat sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan empat dimensi tersebut. Di tingkat provinsi ada Sulawesi Utara, sementara di tingkat kabupaten ada di Manokwari.

Frietz Edward Siregar merinci komponen-komponen yang membuat suatu daerah bisa disebut 'rawan'. Selain itu, menurut Frietz, Bawaslu juga menyoroti Pilkada di beberapa daerah yang diikuti oleh keluarga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berikut wawancara *Tribun Network* bersama Frietz Edward Siregar:

Tribun: Bagaimana tingkat kerawanan Pilkada 2020?

Frietz: Tahun 2020 ada 270 daerah, ada 9 provinsi. Cuma Aceh dan DKI yang tidak ada

Pilkada. Kami sudah membuat Indeks Kerawanan Pemilu 2020. Memang ada beberapa daerah yang rawan seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kalau Kabupaten/Kota, Manokwari yang paling tinggi. Diikuti Kota Makassar, karena Makassar lah satu-satunya yang kotak kosong bisa menang. Itu tidak ada kasus di belahan dunia lain.

Tribun: Isu-isu apa saja yang menjadi sorotan pada Pilkada 2020?

Frietz: Ada empat, pertama isu netralitas ASN karena itu bagaimana penggunaan kekuasaan oleh para pejabat atau inkumben, seperti menggunakan APBD atau program, dan menggunakan ASN. Yang kedua mengenai mahar politik atau politik uang. Misal dari pelaporan dana kampanyenya.

Ketiga kasus penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Keempat mengenai DPT Daftar Pemilih Tetap. Indeks Kerawanan Pemilu setiap daerah punya persoalan berbeda. Empat dimensi, indeks sosial politik, indeks kontestasi, dimensi penyelenggara pemilu, partisipasi, kita buat angka-angka statistik jadi ketahuan mana rawan rendah, sedang tinggi.

Jadi masing-masing daerah punya persoalan tinggi-tinggi.

Dari situ ketahuan persoalan misal konflik suku termasuk di Manokwari, pendekatan dari Bawaslu pendekatan kepada ketua adat.

Indeks kontestasi misal Sulut, kita bisa lihat politik uang tinggi. Kita antisipasi dengan mengidentifikasi politik uang. Antisipasi tergantung dimensi. Semuanya proses pengawasan, pencegahan, penindakan. Ada kekhususan tiap-tiap daerah.

Tribun: Yang paling tinggi dari semua dimensi daerah mana?

Frietz: Kalau untuk provinsi, Sulawesi Utara, kalau Kabupaten, di Manokwari. Manokwari nilai sospol paling tinggi. Kita berharap tidak terjadi, tapi menjadi antisipasi apa strategi pengawasan yang diterapkan.

Tribun: Kalau terendah di mana? Yang paling aman?

Frietz: Karangasem Bali itu paling rendah secara kabupaten/kota. Kalau provinsi paling rendah Kalimantan Utara. Meskipun agak tinggi di angka 59 tapi dibanding Sulut 91 ya jauh. Sulawesi Tengah, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Kepri, Kalteng, Kalsel, Kaltara. Itu juga berhubungan dengan gabungan empat dimensi itu. (**denys destriawan/tribunnetwork/cep**)